

KESADARAN POLITIK WARGA NEGARA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Ais Nurdin

Prodi PPKn, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo

Email: aisnurdin999@gmail.com

Abstract:

This research aims to examine in depth how citizens' political awareness can be formed through civic education. The method used in this research is a literature study, which examines and analyzes various scientific sources, including journals, books, and previous research relevant to the themes of civic education and political education. The results of this study indicate that Civics Education has a significant influence on the growth of citizens' political awareness, as it not only presents theory but also instills the values, attitudes, and skills needed to participate in democratic life. In shaping citizens' political awareness, three important aspects need to be emphasized. First, civic knowledge, which provides a conceptual foundation regarding rights, obligations, democratic principles, and political mechanisms, so that citizens understand their position and role in national life. Second, civic attitudes, which instill moral values, a sense of responsibility, tolerance, and social concern as a form of internalization of political knowledge. Third, civic skills, which teach practical skills such as dialogue, sound argumentation, joint decision-making, and active participation in political and social activities. These three aspects complement each other and form a solid foundation for increasing citizens' political awareness, enabling them to become critical, participatory, and responsible individuals in maintaining the sustainability of democracy.

Keywords: Political Awareness, Citizens, Civics Education

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kesadaran politik warga negara dapat terbentuk melalui pendidikan kewarganegaraan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi literatur, dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber ilmiah, baik berupa jurnal, buku, maupun penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tumbuhnya kesadaran politik warga negara, karena pendidikan ini bukan hanya menyajikan teori, tetapi juga menanamkan nilai, sikap, serta keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Dalam membentuk kesadaran politik warga negara, terdapat tiga aspek penting yang perlu ditekankan. Pertama, pengetahuan kewarganegaraan, yang memberikan dasar konseptual mengenai hak, kewajiban, prinsip demokrasi, serta mekanisme politik, sehingga warga negara memahami posisi dan perannya dalam kehidupan berbangsa. Kedua, sikap kewarganegaraan, yang menanamkan nilai moral, rasa tanggung jawab, toleransi, serta kepedulian sosial sebagai wujud internalisasi dari pengetahuan politik. Ketiga, keterampilan kewarganegaraan, yang mengajarkan kemampuan praktis seperti berdialog, berargumentasi sehat, mengambil keputusan bersama, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik dan sosial. Ketiga aspek ini saling melengkapi dan membentuk fondasi yang kokoh dalam meningkatkan kesadaran politik warga negara, sehingga mereka mampu menjadi individu yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan demokrasi.

Kata Kunci: Kesadaran Politik, Warga Negara, Pendidikan Kewarganegaraan

PENDAHULUAN

Negara demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak untuk memilih dan menentukan pemimpin mereka, serta berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan bersama. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 bahwa kedaulatan di atas tangan rakyat. Demokrasi, mengutamakan prinsip bahwa pemerintah harus bekerja untuk kepentingan rakyat dan rakyat berhak menentukan arah kebijakan negara. Salah satu ciri utama negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang bebas, adil, dan jujur, di mana setiap warga negara yang telah memenuhi syarat memiliki hak suara yang sama tanpa adanya paksaan atau manipulasi. Pemilu ini bukan hanya sekedar untuk memilih pemimpin, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat.

Keberhasilan dalam sistem negara demokrasi sangat bergantung pada keterlibatan aktif warga negara dalam berbagai proses politik, terutama dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Pemilu dan pilukada bukan hanya ajang untuk memilih pemimpin, tetapi juga merupakan manifestasi dari hak dan kewajiban setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan negara. Tanpa partisipasi aktif dari rakyat, prinsip dasar demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat akan terancam, dan hal ini dapat berimbas pada rendahnya kualitas

pemerintahan serta legitimasi politik. Oleh karena itu, kesadaran politik warga negara menjadi sangat penting dalam memastikan keberhasilan demokrasi.

Atas dasar itu, kesadaran politik mencakup pemahaman warga negara tentang sistem politik, hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari negara, serta kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam proses pemilu dan pilukada. Warga negara yang memiliki kesadaran politik yang tinggi tidak hanya akan menggunakan hak suara mereka, tetapi juga akan aktif dalam berbagai kegiatan politik lainnya, seperti diskusi politik, mengkritisi kebijakan pemerintah, dan bahkan terlibat dalam organisasi masyarakat sipil. Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan dalam pendidikan politik memainkan peran penting dalam menumbuhkan kesadaran politik yang mendalam, yang akhirnya dapat menghasilkan pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab.

Selain itu, kesadaran politik yang tinggi juga berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan demokrasi itu sendiri. Warga negara yang sadar akan hak-haknya tidak hanya akan memilih pemimpin yang kompeten dan transparan, tetapi juga akan mendorong akuntabilitas pemerintah dan melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa kesadaran politik yang berkembang, masyarakat cenderung menjadi pasif dan terisolasi dari proses politik, yang pada akhirnya dapat membuka ruang bagi praktik-praktik politik yang tidak sehat, seperti politik uang, korupsi, dan otoritarianisme. Dengan demikian, kesadaran politik warga negara

bukan hanya menjadi kunci keberhasilan demokrasi dalam jangka pendek, tetapi juga merupakan pondasi yang memastikan keberlanjutan dan perkembangan demokrasi yang sehat di masa depan. Demokrasi yang dijalankan dengan partisipasi aktif dan cerdas dari warganya akan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan aspirasi rakyat, yang pada gilirannya dapat membawa negara menuju kemajuan yang lebih baik.

Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan hadir bukan sekadar sebagai mata pelajaran formal, melainkan sebagai solusi nyata dalam menanggulangi berbagai persoalan kebangsaan yang kerap muncul akibat rendahnya kesadaran politik dan minimnya pemahaman warga negara terhadap hak serta kewajibannya. Melalui pendidikan ini, peserta didik diarahkan untuk memahami bagaimana sistem politik bekerja, apa makna dan nilai yang terkandung dalam demokrasi, serta mengapa penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih dari itu, pendidikan kewargaan menekankan pentingnya partisipasi aktif setiap warga negara, baik dalam bentuk keterlibatan di ruang publik, pengawasan terhadap kebijakan, hingga kontribusi melalui jalur hukum dan mekanisme sah lainnya.

Kesadaran politik yang terbangun dari pendidikan ini tidak hanya berhenti pada tataran pengetahuan, melainkan juga mengasah kemampuan individu untuk menganalisis dinamika politik, mengidentifikasi tantangan-tantangan strategis yang dihadapi bangsa, serta merumuskan cara yang efektif, etis, dan

konstitusional untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan politik. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam mencetak warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan siap menghadapi kompleksitas kehidupan demokratis secara sadar dan terarah. Temuan (Rahman, 2018) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran politik warga negara.

Melalui pendidikan ini, warga negara memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika politik, nilai-nilai demokrasi, serta prinsip-prinsip dasar bernegara, sehingga mereka tidak sekadar menjadi penonton, melainkan aktor yang aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Pemahaman tersebut selanjutnya membentuk rasa tanggung jawab sosial dan politik yang kuat, yang mendorong individu untuk ikut serta dalam berbagai proses pengambilan keputusan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Dengan kata lain, pendidikan kewarganegaraan menjadi instrumen penting untuk melahirkan masyarakat yang kritis terhadap kebijakan publik, berani menyuarakan aspirasi secara konstruktif, serta berpartisipasi dalam upaya mewujudkan kehidupan politik yang transparan, demokratis, dan berkeadilan.

Oleh karena itu, membangun kesadaran politik warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan tidak sekadar dipandang

sebagai kebutuhan sesaat, melainkan sebagai investasi strategis jangka panjang yang berimplikasi langsung terhadap kualitas demokrasi dan masa depan bangsa. Kesadaran politik yang dibentuk melalui pendidikan ini mampu memperkuat pondasi demokrasi agar tetap berjalan secara berkelanjutan, sehat, dan partisipatif, sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih adil, patuh pada hukum, serta memiliki tanggung jawab kolektif terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan pandangan (Hemafitria, 2015), pendidikan kewarganegaraan merupakan instrumen penting dalam membentuk warga negara yang baik, yakni mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, taat hukum, serta memiliki kecintaan yang mendalam terhadap tanah air.

(Irwan, J, & Jaya, 2021) yang menegaskan bahwa politik dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan dua ranah yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni melahirkan warga negara yang aktif, kritis, serta berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. (Hermawan, 2020) menekankan bahwa pendidikan politik pada hakikatnya juga diarahkan untuk membentuk warga negara yang baik, sehingga secara konseptual maupun praktis terdapat kesinambungan erat antara pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik. Dengan demikian, keduanya menjadi pilar fundamental dalam membangun masyarakat demokratis yang sadar hak dan kewajibannya, berorientasi pada kebaikan bersama, serta memiliki kapasitas untuk

menjaga keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut (Prayugo & Prayitno, 2022), penyelenggaraan pendidikan politik bagi warga negara memiliki fungsi strategis untuk menumbuhkan kesadaran agar warga negara tidak hanya menjadi penonton dalam dinamika pemerintahan, tetapi juga terlibat aktif dalam mengendalikan, menilai, dan meningkatkan kualitas peran serta mereka dalam penyelenggaraan negara serta implementasi kebijakan publik. Pendidikan politik dipahami sebagai sebuah proses berkesinambungan yang menekankan pentingnya pembentukan kesadaran atas peran manusia dan peran kewarganegaraan. Dalam konteks peran peserta didik, pendidikan politik memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengembangkan bakat, potensi, dan kemampuan yang melekat pada dirinya, sehingga mereka dapat berfungsi secara optimal dalam arena politik sesuai dengan status dan misi hidupnya.

Sementara itu, peran kewarganegaraan diarahkan pada upaya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif, baik melalui proses berpikir kritis, berdialog secara konstruktif, maupun bertindak dalam ranah politik. Tujuannya adalah untuk mendorong tercapainya kemajuan dan perbaikan kehidupan berbangsa melalui kesadaran kolektif dalam menjalankan hak sekaligus kewajiban politiknya. Dengan demikian, pendidikan politik bukan hanya sarana pengetahuan, tetapi juga wahana pembentukan karakter politik yang mendorong warga negara agar terlibat secara sadar, rasional, dan

bertanggung jawab dalam setiap proses demokrasi. Atas dasar tersebut, urgensi membangun kesadaran politik melalui pendidikan kewarganegaraan menjadi semakin nyata ketika dihadapkan pada tantangan global dan lokal yang kompleks, mulai dari meningkatnya ketidakpercayaan warga negara terhadap lembaga-lembaga politik, maraknya penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks, hingga ancaman serius terhadap integritas pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi.

Kondisi ini menuntut adanya strategi pendidikan kewarganegaraan yang mampu membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis, agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu menyesatkan yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Lebih jauh, pendidikan kewarganegaraan juga berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya partisipasi politik yang cerdas, khususnya dalam menggunakan hak pilih dengan bijak, berdasarkan pengetahuan yang benar dan pertimbangan rasional, bukan semata-mata karena dorongan emosional atau tekanan kelompok tertentu. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi benteng moral dan intelektual bagi warga negara dalam menghadapi dinamika politik modern, serta memastikan terciptanya masyarakat yang lebih matang, berintegritas, dan berdaya saing dalam kehidupan demokratis.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di banyak negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi

sejumlah kendala yang membuatnya belum sepenuhnya efektif. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kurikulumnya yang terkesan monoton, berfokus pada teori semata, serta tidak cukup relevan dengan dinamika politik kontemporer yang dihadapi warga negara, seperti disrupsi digital, polarisasi politik, maupun isu-isu global yang berimbas langsung pada kehidupan masyarakat. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya pemahaman politik yang mendalam di kalangan warga negara, yang kemudian berdampak pada minimnya keterlibatan aktif mereka dalam proses politik, baik dalam bentuk partisipasi pemilu, pengawasan kebijakan publik, maupun kontribusi dalam ruang dialog demokratis.

Ketidakmampuan pendidikan kewarganegaraan untuk mengikuti perkembangan zaman membuat sebagian peserta didik menganggapnya tidak menarik dan kurang bermanfaat dalam menghadapi realitas politik yang kompleks. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali bagaimana pendidikan kewarganegaraan dirancang dan dilaksanakan, dengan menekankan pada pendekatan yang lebih kontekstual, interaktif, serta berbasis pada isu-isu nyata yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Upaya ini diharapkan tidak hanya memperkuat pemahaman politik, tetapi juga menumbuhkan motivasi partisipatif, sehingga pendidikan kewarganegaraan benar-benar menjadi sarana strategis dalam membentuk warga negara yang kritis, aktif, dan adaptif terhadap tantangan demokrasi modern.

Dengan kondisi demikian, jelas bahwa kesadaran politik warga negara memegang

peran yang sangat penting dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, sebab hanya melalui kesadaran tersebut partisipasi aktif warga negara dapat terwujud secara nyata. Kesadaran politik bukan sekadar pemahaman tentang mekanisme politik, melainkan juga menyangkut kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai bagian dari kehidupan bernegara. Hal ini sejalan dengan pandangan (Yanuar, 2017) yang menegaskan bahwa kesadaran politik warga negara merupakan kunci utama dalam mendorong partisipasi politik; tanpa adanya kesadaran berpolitik, mustahil tercapai partisipasi politik yang aktif, yang pada akhirnya menghambat terwujudnya kehidupan demokrasi yang sehat dan berkualitas.

(Tarsidi, 2018) juga menekankan pentingnya pendidikan politik bagi seluruh warga negara sebagai sarana untuk mentransfer pengetahuan tentang politik, sekaligus menanamkan nilai-nilai politik yang konstruktif. Tujuannya adalah membentuk warga negara yang baik, yaitu mereka yang mampu bersikap kritis, rasional, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak politiknya serta berperan aktif dalam mendukung terwujudnya demokrasi yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditegaskan bahwa kesadaran politik merupakan faktor kunci bagi keberhasilan demokrasi, sehingga warga negara perlu dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip demokrasi, hak dan kewajiban, serta mekanisme politik yang mendasari proses pengambilan keputusan.

Dalam hal ini, Pendidikan Kewarganegaraan memainkan peran yang sangat penting sebagai instrumen strategis untuk mempengaruhi sekaligus memberikan pemahaman politik, terutama melalui jalur pendidikan formal di lingkungan sekolah. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara tidak hanya diperkenalkan dengan konsep partisipasi politik secara teoritis, tetapi juga diarahkan untuk mencapai kompetensi kewarganegaraan yang meliputi tiga dimensi penting: pengetahuan kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan. Pengetahuan kewarganegaraan memberikan pemahaman tentang sistem politik dan demokrasi, sikap kewarganegaraan membentuk nilai-nilai tanggung jawab, toleransi, dan kepedulian, sementara keterampilan kewarganegaraan melatih kemampuan nyata untuk berpartisipasi secara aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Dengan materi tersebut, pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya memiliki wawasan politik, tetapi juga kesadaran politik yang matang serta kompetensi untuk berpartisipasi dalam politik secara sehat, bermutu, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode studi kepustakaan atau studi literatur, yang pada dasarnya berfokus pada penelaahan

secara sistematis terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber-sumber tersebut meliputi jurnal penelitian, buku, artikel ilmiah, catatan, hingga laporan akademis yang memiliki keterkaitan erat dengan tema pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik. Tujuan utama dari penggunaan metode ini adalah untuk menghimpun, mengkaji, serta menganalisis informasi maupun temuan penelitian sebelumnya, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman yang mendukung penulisan karya ilmiah.

Dengan kata lain, studi kepustakaan berfungsi memperkuat dasar teoritis penelitian agar memiliki pijakan yang kokoh, sekaligus memperkaya perspektif penulis terhadap topik yang sedang dikaji. Melalui telaah literatur yang mendalam, data yang terkumpul tidak hanya bersifat sekadar pendukung, tetapi juga berperan dalam membangun argumen yang logis, kritis, dan akademis. Hal ini menjadikan penelitian kepustakaan bukan hanya sebagai proses mengutip gagasan dari berbagai sumber, melainkan sebagai upaya sistematis untuk menyusun kerangka berpikir yang utuh, relevan, serta teruji secara ilmiah dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Politik Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Kesadaran politik warga negara pada dasarnya merupakan pilar penting yang

menentukan keberlangsungan sistem demokrasi, sebab tanpa adanya kesadaran tersebut demokrasi hanya akan berjalan secara prosedural tanpa diiringi kualitas partisipasi masyarakat. Kesadaran politik ini memberikan pemahaman kepada warga negara mengenai posisi dan peran dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menegaskan hak-hak yang dapat diperoleh serta kewajiban yang harus dipenuhi demi terciptanya keseimbangan dalam kehidupan sosial-politik. Warga negara yang memiliki kesadaran politik akan lebih mampu bersikap kritis, peduli, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai proses politik, baik dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, maupun pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Untuk menumbuhkan kesadaran tersebut, salah satu jalur strategis yang dapat ditempuh adalah melalui pendidikan kewarganegaraan, karena mata pelajaran ini dirancang bukan hanya untuk memberikan wawasan teoritis mengenai konsep demokrasi, hak asasi manusia, dan sistem politik, melainkan juga menanamkan sikap positif serta melatih keterampilan praktis yang dibutuhkan agar warga negara dapat terlibat secara sehat, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai sarana pembelajaran yang komprehensif, membekali warga negara dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mendukung lahirnya partisipasi politik berkualitas demi memperkuat sendi-sendi demokrasi.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki fungsi strategis sebagai wadah pembelajaran yang tidak hanya memberikan pengetahuan dasar, tetapi juga membangun pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip demokrasi, nilai-nilai hak asasi manusia, serta mekanisme politik yang berlaku dalam suatu negara. Melalui pendidikan ini, warga negara dibimbing untuk memahami betapa pentingnya partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan politik dan sosial, seperti keterlibatan dalam pemilihan umum, keikutsertaan dalam organisasi masyarakat, serta keterlibatan dalam kegiatan yang mendukung kepentingan bersama. Selain itu, siswa juga diajak untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi beragam isu kebangsaan, sehingga mereka mampu menilai suatu persoalan secara objektif, menyaring informasi yang beredar, dan memberikan solusi yang relevan dengan kondisi masyarakat. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berhenti pada hafalan konsep atau teori politik semata, melainkan berperan besar dalam menumbuhkan kesadaran, kepekaan, serta tanggung jawab sosial dan politik yang membuat individu lebih peduli terhadap permasalahan di sekitarnya serta mampu berkontribusi bagi penguatan kehidupan demokratis.

Pada konteks pendidikan kewarganegaraan pendidikan politik yang memiliki peran penting dalam membentuk pandangan demokratis para peserta didik dilingkungan sekolah. Melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga

sebagai pembentuk karakter dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, serta tanggung jawab sosial yang dapat membangkitkan kesadaran politik peserta didik. Kesadaran ini menjadi landasan bagi pelajar untuk memahami bahwa mereka bukan sekadar individu dalam lingkungan sekolah, melainkan juga calon warga negara yang memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi bangsa.

Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menyampaikan kepada peserta didik betapa relevannya Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk kepribadian dan kesadaran politik mereka. Pendidikan ini tidak berhenti pada aspek kognitif atau pemahaman konsep politik saja, melainkan menekankan pula pada kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai politik tersebut dalam tindakan nyata, baik dalam skala kecil di lingkungan sekolah maupun dalam partisipasi politik di masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi tidak hanya sebagai sarana untuk mengetahui teori, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran yang mengarahkan siswa agar mampu menjadi individu yang demokratis, kritis, serta siap berperan aktif dalam kehidupan politik di masa depan (Santika, Purnawijaya, & Sujana, 2019).

Oleh sebab itu, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari mata pelajaran memiliki tujuan yang sangat penting dalam membentuk peserta didik agar kelak menjadi warga negara yang baik, demokratis, berakarakter, serta mampu berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita demokrasi demi pembangunan bangsa Indonesia. Melalui materi

yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan, siswa diperkenalkan pada konsep-konsep dasar partisipasi politik, mulai dari pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara hingga bentuk-bentuk keterlibatan dalam kehidupan politik yang sehat. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai sarana yang tepat untuk mengenalkan praktik demokrasi sejak dini, menanamkan nilai-nilai keterlibatan aktif, serta membiasakan siswa untuk menghargai perbedaan pendapat dan mengedepankan kepentingan bersama.

Atas dasar tersebut pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pengembangan partisipasi politik ini sesungguhnya menjadi modal dasar bagi siswa agar mampu membangun kesadaran diri, kesiapan, serta tanggung jawab sebagai calon warga negara yang berdaya dan kritis. Pada akhirnya, bekal ini akan mengarahkan mereka untuk tumbuh menjadi individu yang tidak hanya memahami demokrasi secara teoritis, tetapi juga siap menerapkannya dalam kehidupan nyata dengan partisipasi yang aktif, cerdas, dan bertanggung jawab, sehingga cita-cita demokrasi yang baik dapat tercapai secara berkelanjutan. Pendidikan Kewarganegaraan juga menginternalisasi nilai-nilai moral dan etika politik. Kesadaran politik tidak hanya berkaitan dengan aspek pengetahuan, tetapi juga kesadaran untuk berperilaku jujur, adil, serta menjunjung kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kesadaran politik warga negara yang ditumbuhkan melalui Pendidikan

Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat vital dalam proses pembentukan masyarakat yang melek politik, kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan ini bukan hanya sebatas membekali siswa dengan teori-teori politik, tetapi lebih jauh lagi mengarahkan mereka untuk menjadi warga negara yang aktif, mampu menyalurkan aspirasi, serta menjaga kualitas demokrasi di Indonesia agar tetap berjalan sesuai nilai-nilai yang diharapkan. Kesadaran politik yang ditanamkan sejak dini akan berfungsi sebagai fondasi bagi generasi muda untuk tumbuh menjadi pribadi yang peduli terhadap persoalan kebangsaan, memiliki kemauan untuk terlibat dalam proses politik secara sehat, serta mampu berperan sebagai pengontrol jalannya pemerintahan sekaligus menjadi penggerak terciptanya kehidupan politik yang adil, transparan, dan demokratis. Dengan bekal tersebut, lahirlah generasi penerus bangsa yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, melainkan juga memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kepentingan bersama demi keberlangsungan demokrasi yang berkualitas.

Berdasarkan hal tersebut, peranan Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang sekolah dasar, menengah pertama, hingga menengah atas sangat penting untuk diintegrasikan secara berkesinambungan, agar peserta didik sejak dini memperoleh pengenalan dan pemahaman yang utuh tentang partisipasi politik, baik dalam ranah teoritis maupun dalam praktik politik yang bertanggung jawab di lingkungannya (Santika,

2022) Pengintegrasian ini menjadi strategi mendasar agar peserta didik tidak hanya memahami konsep demokrasi, hak, dan kewajiban warga negara, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui aktivitas nyata seperti keterlibatan dalam organisasi sekolah, hingga sikap kritis terhadap isu-isu sosial yang muncul di sekitar mereka.

Keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran politik warga negara dapat diukur dari sejauh mana mereka mencapai kompetensi kewarganegaraan, yang meliputi tiga aspek penting, yakni pengetahuan kewarganegaraan, pemahaman tentang prinsip, norma, dan sistem politik; sikap kewarganegaraan, berupa nilai-nilai demokratis, toleransi, dan tanggung jawab; serta keterampilan kewarganegaraan, yang diwujudkan dalam kemampuan berpartisipasi aktif, berdialog, menyelesaikan konflik secara damai, serta ikut serta dalam kegiatan politik maupun sosial yang sehat. Ketiga aspek ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pendidikan kewarganegaraan berhasil mencetak generasi yang sadar politik, berakarakter, dan siap menjadi warga negara yang aktif serta bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge)

Pengetahuan kewarganegaraan merupakan aspek fundamental dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berfungsi membekali warga negara, khususnya peserta didik, dengan pemahaman mendalam mengenai nilai, norma, prinsip, serta

sistem politik yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengetahuan ini tidak hanya sebatas penguasaan materi konseptual tentang demokrasi, hak asasi manusia, konstitusi, maupun mekanisme pemerintahan, tetapi juga mencakup pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Melalui pengetahuan kewarganegaraan, siswa diarahkan untuk memahami struktur politik negara, fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, peran partai politik, hingga mekanisme pemilu yang menjadi instrumen demokrasi. Pemahaman ini penting agar siswa dapat melihat keterkaitan antara teori dengan praktik politik yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun dalam dinamika nasional.

Selain itu, pengetahuan kewarganegaraan menekankan pada kemampuan untuk menafsirkan secara kritis berbagai isu politik, hukum, dan sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan bekal pengetahuan ini, peserta didik diharapkan mampu membedakan informasi yang benar dengan propaganda atau hoaks, serta memahami konsekuensi dari setiap kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah. Pengetahuan ini juga berfungsi menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran aktif warga negara dalam mengawal jalannya pemerintahan dan menjaga tegaknya nilai demokrasi. Dengan kata lain, pengetahuan kewarganegaraan menjadi pondasi utama bagi pembentukan sikap kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan, sebab tanpa

pemahaman yang kuat mengenai konsep, prinsip, dan mekanisme politik, siswa akan kesulitan untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupannya.

Atas dasar itu, pengetahuan kewarganegaraan dapat dipandang sebagai pilar utama dalam membentuk warga negara yang cerdas, kritis, serta memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan bangsa dan keberlanjutan demokrasi (Wijaya, Mulyadi, & Suhendar, 2020). Pengetahuan ini, ketika diintegrasikan dalam proses Pendidikan Kewarganegaraan, berfungsi sebagai sarana penting dalam mempersiapkan generasi muda agar memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pemahaman tersebut tidak hanya berhenti pada ranah kognitif, tetapi juga membentuk pribadi yang mampu berpikir kritis, memiliki kesadaran politik, serta menjunjung tinggi tanggung jawab moral sebagai warga negara yang baik. Pengetahuan kewarganegaraan memberikan bekal yang mendorong setiap individu untuk berperan aktif dalam kehidupan politik, mulai dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan hingga partisipasi dalam kontestasi politik yang sehat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penguasaan pengetahuan kewarganegaraan menjadi fondasi utama yang memungkinkan warga negara tidak hanya memahami demokrasi secara teoritis, tetapi juga menjadikannya praktik nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Nurgiansah, 2021).

Sikap Kewarganegaraan (Civic Disposition)

Sikap kewarganegaraan merupakan dimensi penting dalam membentuk karakter

warga negara yang tidak hanya memahami nilai dan norma politik, tetapi juga mampu menginternalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini mencerminkan orientasi warga negara terhadap prinsip demokrasi, rasa hormat pada hukum, penghargaan terhadap hak asasi manusia, serta kepedulian terhadap kepentingan bersama. Dengan memiliki sikap kewarganegaraan yang baik, individu tidak hanya sekadar mengetahui teori politik, melainkan juga menunjukkan perilaku nyata seperti toleransi terhadap perbedaan, sikap kritis terhadap kebijakan publik, serta partisipasi aktif dalam kegiatan sosial maupun politik. Hal ini penting karena sikap kewarganegaraan berfungsi sebagai penghubung antara pengetahuan politik yang bersifat konseptual dengan tindakan politik yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kaitannya dengan kesadaran politik, sikap kewarganegaraan menjadi pondasi yang membentuk orientasi politik warga negara agar mampu menjalankan peran secara aktif dan bertanggung jawab. Kesadaran politik tanpa didukung sikap yang benar hanya akan menghasilkan perilaku apatis, emosional, atau bahkan manipulatif dalam kehidupan demokrasi. Melalui sikap kewarganegaraan yang sehat, warga negara diarahkan untuk memahami pentingnya keterlibatan politik secara etis, mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, serta berpartisipasi dengan penuh tanggung jawab dalam proses demokrasi. Dengan demikian, sikap kewarganegaraan berperan penting dalam memperkuat kesadaran politik, karena

melahirkan generasi yang bukan hanya kritis dalam berpikir, tetapi juga bijak dalam bertindak. Keselarasan antara sikap kewarganegaraan dan kesadaran politik inilah yang menjadi syarat terbentuknya masyarakat demokratis yang beradab, aktif, serta mampu menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Temuan (Rasjid, et al., 2024) menunjukkan bahwa sikap kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam membangun kesadaran politik warga negara, terutama dalam memahami serta menjalankan hak dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari kehidupan demokratis. Sikap kewarganegaraan yang baik akan menumbuhkan rasa peduli, tanggung jawab, dan keterlibatan aktif dalam kehidupan politik maupun sosial, sehingga warga negara tidak hanya memahami teori tentang demokrasi, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam tindakan nyata. Dengan adanya sikap kewarganegaraan yang terarah, kesadaran politik tidak hanya terbangun pada ranah kognitif, melainkan juga tercermin dalam perilaku sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, penghormatan terhadap hukum, serta tanggung jawab moral sebagai warga negara yang baik. Temuan ini menegaskan bahwa sikap kewarganegaraan merupakan fondasi utama dalam membentuk kesadaran politik yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab demi tercapainya kualitas demokrasi yang berkelanjutan.

Menurut (Darmadi, 2013), pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan, mengembangkan, sekaligus melestarikan nilai-nilai luhur serta

moral yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat tercermin dalam perilaku nyata peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berorientasi pada pemahaman teoretis, melainkan juga diarahkan untuk membentuk karakter dan sikap kewarganegaraan yang mencerminkan kesadaran politik dan kepribadian demokratis. Sementara itu, (Kartono, 2009) menegaskan bahwa pendidikan politik pada hakikatnya merupakan bagian dari proses pembentukan yang berorientasi pada kesadaran politik. Pendidikan ini tidak dimaksudkan untuk melahirkan warga negara yang unggul secara intelektualitas saja akan tetapi juga membentuk pribadi yang kritis, cerdas, serta mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Artinya, pendidikan politik tidak sekadar menekankan aspek kognitif, tetapi juga diarahkan agar individu memiliki sikap dan keterampilan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sosial-politik masyarakat secara nyata.

Keterampilan Kewarganegaraan (civic skills)

Keterampilan kewarganegaraan merupakan aspek penting yang menjadi terhadap pengetahuan dan sikap kewarganegaraan dengan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jika pengetahuan memberikan dasar konseptual dan sikap menanamkan nilai moral serta orientasi politik, maka keterampilanlah yang mewujudkan

keduanya dalam bentuk tindakan yang nyata, terarah, dan bertanggung jawab. Keterampilan ini meliputi kemampuan berpikir kritis, berdialog secara sehat, mengambil keputusan melalui musyawarah, menyelesaikan konflik secara damai, hingga berpartisipasi aktif dalam organisasi sosial maupun politik. Keterampilan kewarganegaraan tidak hanya membekali individu dengan kecakapan praktis, tetapi juga mengarahkan mereka untuk mampu menghadapi tantangan demokrasi secara cerdas dan produktif.

Dengan demikian keterampilan kewarganegaraan menjadi instrumen yang memastikan bahwa pengetahuan dan sikap kewarganegaraan tidak berhenti pada teori maupun nilai, tetapi benar-benar diwujudkan dalam perilaku sehari-hari yang demokratis, adil, dan bertanggung jawab. Seorang warga negara yang memiliki keterampilan kewarganegaraan yang baik akan lebih siap menghadapi dinamika politik, mampu mengkritisi kebijakan publik, serta berani menyuarakan aspirasi dengan cara yang konstruktif. Dengan kata lain, keterampilan kewarganegaraan berfungsi sebagai jembatan antara kesadaran politik dengan tindakan nyata dalam kehidupan demokrasi, sehingga generasi muda tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga pelaku aktif dalam pembangunan bangsa.

Pada konteks ini, kaitannya dengan kesadaran politik warga negara, keterampilan kewarganegaraan menjadi instrumen utama yang mengarahkan kesadaran politik agar tidak berhenti pada pemahaman dan sikap semata, tetapi benar-benar terwujud dalam perilaku nyata. Kesadaran politik tanpa keterampilan

akan menjadikan warga negara hanya pasif atau sebatas pengamat dalam dinamika politik. Sebaliknya, ketika kesadaran politik didukung keterampilan kewarganegaraan, individu dapat menyalurkan hak politiknya dengan benar, melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, serta berperan aktif dalam proses politik tanpa terjebak pada tindakan manipulatif atau destruktif. Oleh sebab itu, keterampilan kewarganegaraan memperkuat kesadaran politik agar terimplementasi melalui partisipasi yang sehat, kritis, dan demokratis, baik dalam lingkup sekolah, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa.

Mensinyalir hal tersebut, keterampilan kewarganegaraan berperan penting dalam mendorong warga negara untuk mampu menjadi pengontrol sekaligus penggerak dalam kehidupan politik. Warga negara yang memiliki kesadaran politik tinggi, apabila dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi politik, keterampilan advokasi, serta keterampilan berpartisipasi, akan lebih efektif dalam memperjuangkan aspirasi, mengawal kebijakan publik, sekaligus menjaga kualitas demokrasi. Dengan demikian, kesadaran politik yang dibangun sejak dini akan semakin kuat apabila ditopang oleh keterampilan kewarganegaraan, karena keduanya saling melengkapi dalam mencetak generasi warga negara yang aktif, peduli, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan temuan (Efendi, 2020) yang menegaskan bahwa keterampilan kewarganegaraan merupakan sarana yang tepat untuk mendorong tumbuhnya kesadaran politik warga negara.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap konteks tujuan, fungsi, serta peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan politik, dapat dipahami bahwa mata pelajaran ini memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk kesadaran politik warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan konsep teoritis mengenai demokrasi, sistem politik, maupun nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga berfungsi sebagai media yang menanamkan pemahaman, menumbuhkan sikap, sekaligus melatih keterampilan peserta didik agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi instrumen penting dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kritis, peduli, dan bertanggung jawab terhadap dinamika politik di lingkungannya.

Lebih jauh, penguatan pendidikan politik melalui Pendidikan Kewarganegaraan dapat ditekankan pada tiga aspek utama yang saling berkaitan. Pertama, pengetahuan kewarganegaraan, yang memberikan dasar konseptual mengenai hak, kewajiban, nilai demokrasi, serta mekanisme politik sehingga siswa memahami peran mereka sebagai warga negara. Kedua, sikap kewarganegaraan, yang menekankan pembentukan karakter demokratis, sikap toleran, rasa tanggung jawab, dan kepedulian sosial sebagai wujud internalisasi nilai-nilai politik dalam diri peserta didik. Ketiga, keterampilan kewarganegaraan, yang melatih kemampuan

praktis seperti berkomunikasi, berdialog, mengambil keputusan melalui musyawarah, hingga menyelesaikan konflik dengan cara damai, sehingga siswa siap berperan aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Ketiga aspek ini menjadi fondasi integral yang memastikan bahwa kesadaran politik warga negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis, melainkan tercermin dalam perilaku nyata yang mendukung terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Darmadi, H. (2013). Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi. Bandung: Alfabeta.
- Efendi, I. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan: Wahana Pengembangan Kompetensi Warganegara Dalam Pengenalan Partisipasi Politik Siswa Sekolah Dasar. *DIDAKTIKA TAUHIDI: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 149-162.
- Hemafitria. (2015). Pembelajaran PKn Sebagai Pendidikan Politik Pemilih Pemula. *Jurnal Edukasi*, 175-189.
- Hermawan, I. C. (2020). Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik di Indonesia. *JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)*, 1-19.
- Irwan, L., J. A. R., & Jaya, I. (2021). Peningkatan Kesadaran Politik Pada Generasi Muda di Kabupaten Maros. *JPMH: Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasanuddin*, 76-99.

- Kartono, K. (2009). Pendidikan Politik. Bandung: Mandar maju.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Petuah Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kontestasi Politik. *AoEJ: Academy of Education Journal*, 39-47.
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 427-442.
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 44-51.
- Rasjid, A. R., Putri, D. S., Nona, Putri, C. T., Gatji, K., Amelia, P., et al. (2024). Pengembangan Sikap Positif Dalam Kesadaran Sosial Untuk Membangun Kohesi Di Masyarakat Society. *AKSIOLOGI: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 317-326.
- Santika, I. N. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual. Surabaya: CV. Global Aksara Pers.
- Santika, I. N., Purnawijaya, I. E., & Sujana, I. G. (2019). Membangun Kualitas Sistem Politik Demokrasi Indonesia Melalui Pemilu Dalam Perspektif Integrasi Bangsa Dengan Berorientasikan Roh Ideologi Pancasila. *Seminar Nasional Hukum Dan Kewarganegaraan*, 74-85.
- Tarsidi, D. Z. (2018). Berfungsikah Pendidikan Politik di Mesin Partai Politik? Pendidikan Politik, Partai Politik. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 50-60.
- Wijaya, K. A., Mulyadi, Y., & Suhendar, I. F. (2020). Peranan Pendidikan Politik dalam Mata Pelajaran PPKN terhadap Tingkat Partisipasi Politik Siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 CIANJUR. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 63-79.
- Yanuar, D. H. (2017). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilukada Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Di Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 54-60.